

PRINSIP 90/10

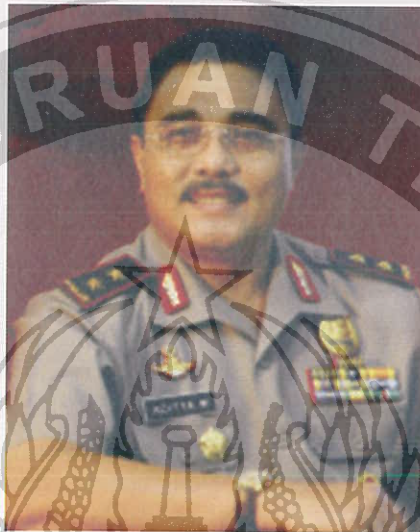
Untuk Dignity dan Integritas Anggota Polri

KITA mulai tulisan ini dengan satu ilustrasi sederhana. Bayangkanlah bahwa Anda membuat janji dengan komandan unit untuk bertemu esok pagi guna membicarakan soal tugas dan promosi jabatan baru bagi Anda di lingkungan kepolisian. Anda berjanji, dan bahkan mengiyakan akan datang tepat waktu, pukul 08.00 WIB teng! Di dalam hati, Anda meyakinkan diri akan hadir lebih awal dari waktu yang dijanjikan itu. Anda tahu persis bahwa komandan Anda termasuk tipe yang sangat tidak suka kepada bawahan yang datang terlambat menjalankan tugas dinas. Bisa-bisa promosi Anda malah dibatalkan. Anda yakin bisa menepati janji itu karena selama ini Anda memang tak pernah sekali pun hadir telat di tempat tugas.

Tak tahu mengapa, ternyata Anda terbangun kesiangan pada hari yang dijanjikan itu sudah pukul 08.25 WIB! Tentu saja, omelan komandan atas keterlambatan ini menari-nari di pelupuk mata Anda. Pembatalan promosi jabatan potensial terjadi. Anda merasa terancam!

Nah, terhadap realitas keterlambatan bangun pagi ini, respons apa yang Anda akan berikan? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan memarahi istri yang masih tergelek di tempat tidur sehingga ia alpa membangunkan Anda? Apakah anak-anak akan Anda omeli sebagai kambing hitam tempat Anda menumpahkan kekesalan? Akankah Anda segera berkegas mengenakan seragam dinas tanpa mandi dan gosok gigi, mengambil kunci mobil, dan segera tancap gas menerobos rambu-rambu lalu lintas agar segera dapat menemui sang komandan di kantor? Mana yang Anda pilih? Adakah alternatif lain?

Untuk menjawab ini, mari



OLEH: ADITYAWARMAN

Sebagian besar hidup kita dapat dikendalikan dengan kearifan dan integritas. Integritas membuat seseorang memiliki dignity (kehormatan) dan sukses dalam banyak ranah kehidupan tak terkecuali dalam menjalani tugas-tugas dan jenjang karier di kepolisian.

coba menelaah 'Prinsip 90/10' sebagaimana pernah dinyatakan Stephen Covey. Menurut penulis motivasional ini, dalam hidup kita, 10 persen peristiwa terjadi karena apa yang kita alami dan 90 persen sisanya ditentukan oleh cara kita bereaksi.

Kita tidak bisa mengendalikan

yang 10 persen itu. Buru-buru ke kantor karena ada pertemuan dengan komandan, namun terbangun telat tak seperti biasanya. Pesawat delay, gaji telat masuk, hidung pesek, muka jerawat, badan pendek, dan berbagai hal lain yang kadang kita keluhkan. Kita tidak bisa mengontrol pesawat yang delay, hidung yang pesek, gaji yang telat masuk ke rekening tabungan, ban mobil bocor, dan banyak hal lain. Namun, di luar semua itu kita bisa mengontrol yang 90 persen, yakni reaksi kita, ketika hal-hal yang 10 persen itu terjadi.

Memiliki hidung pesek dan muka jerawat, apa reaksi kita? Marah-marah, jadi murung dan rendah diri? Lalu apakah dengan begitu hidung kita dapat menjadi mancung dan muka pun bisa mulus? Tentu tidak. Reaksi negatif yang kita keluarkan hanya membuat kita makin jauh dari jalan keluar dan lupa bahwa ada banyak hal positif lain yang kita punya.

Contoh lain sebagaimana ilustrasi di awal tulisan ini: bangun kesiangan dan baru teringat kalau ada janji bertemu komandan. Segera bersalin pakaian tanpa mandi dan gosok gigi, buru-buru mengambil gelas, menyeruput kopi panas, dan... kopi pun tumpah menimpa seragam dinas. Apa reaksi kita? Menggerutu alias mengomel sambil berganti seragam lain? Di mobil pun menyumpah serapah sang istri yang karena ia tertidur maka tak membangunkan kita tepat waktu? Kita juga mengomeli jalanan macet yang membuat perjalanan ke kantor menjadi semakin telat. Takut bertambah telat, dengan anggar pakaian dinas polisi akhirnya kita memaksa meminta jalan kepada pengguna jalan, petentang-petentang menggertak orang-orang, dan... akhirnya secara tak sengaja menyenggol mobil di sebelah



kanan. Bemper mobil itu penyok dan pengemudi yang mobilnya tersenggol marah-marah, ia turun menghampiri meminta ganti rugi. Akibatnya, waktu yang diperlukan menuju kantor malah menjadi semakin molor.

Hari yang dimulai dengan situasi buruk, jika diteruskan dengan reaksi yang buruk ternyata akan membuat semua semakin buruk. Kejadian buruk awal cuma 10 persen, reaksi kita menyumbang 90 persen. Padahal, kejadiannya bisa jauh berbeda bila kita menghadapinya dengan tenang dan berkepala dingin. Dimulai dengan hal yang sama, tapi akhirnya bisa berbeda.

Pengalaman saya selama 35 tahun di kepolisian, terutama ketiga menangani dua wilayah yang pernah bergejolak — Maluku (khususnya Ambon) dan Aceh — mengajarkan hal serupa. Terdapat 10% situasi yang taken for granted berada di luar kendali saya: mendapat perintah melalui telegram rahasia (TR) untuk menjabat Kapolda dan menyelesaikan tugas, kondisi medan tempat bertugas,

dimensi sosiologis masyarakat tempat bertugas, dan realitas situasi. Namun, 90 persen aspek perihal bagaimana kita beraksi terhadap 10 persen situasi itulah yang membuat persoalan yang ada kemudian dapat ditangani, bahkan memberikan aspek ikutan di luar perkiraan. Salah satu aspek ikutan itu adalah terjalannya komunikasi elegan dengan banyak komponen masyarakat yang sebelumnya melihat polisi tidak pada posisi patut dihargai dalam kanevas penegakan hukum. Polisi dianggap sarat dengan masalah. Polisi dipandang dengan penuh stereotipe. Ia dianggap mahir merekayasa masalah sehingga layak untuk tak diapresiasi.

Saya menyebut 90 persen reaksi kita terhadap 10 persen situasi yang ada itu sebagai “kearifan” dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum.

Dalam konteks perbincangan mengenai penegakan hukum, kita tidak mungkin dapat lepas dari

perbincangan soal peran aparat penegaknya, sebab upaya penegakan hukum tentu saja membutuhkan aktor. Terkait hal ini, banyak orang mengeluh dan merasakan bahwa output penegakan hukum di Indonesia sejauh ini tidak berhasil memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Salah satu penyebab utama yang sering dikemukakan adalah karena rendahnya integritas aparat penegak hukum.

Hakim, jaksa, polisi dan pengacara adalah penegak hukum yang memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan keadilan. Merekalah yang semestinya berperan menjadi panutan masyarakat di dalam dua hal itu. Namun, sayangnya, di institusi ini pula sejumlah oknum yang tidak mempunyai integritas dan kapabilitas sebagai penegak hukum berhasil “bermain mata” dan memanfaatkan institusi — apakah melalui seragam dinas, pangkat maupun posisi — untuk mengeruk keuntungan pribadi sehingga akhirnya mengamputasi peran



dan citra polisi di mata publik. Suburnya mafia hukum berpangkal dari sini, dari rendahnya integritas polisi dan penegak hukum lainnya. Integritas yang hancur tampak pada penegak hukum yang melakukan pemerasan, penegak hukum yang terlibat kasus suap, dan penegak hukum yang melakukan pungli. Padahal, sejak awal penegak hukum mempunyai semboyan universal integrity is not negotiable, integritas tidak mengenal kompromi.

Persoalan integritas penegakan hukum akhirnya menjadi bagian dari kondisi bangsa Indonesia saat ini yang menurut teori Samuel P. Huntington berada pada situasi transplacement yang ditandai oleh tarik ulur antara pemikir baru dengan para pemikir lama atau mereka yang menginginkan perubahan dengan mereka yang merupakan bagian dari orde status quo. Situasi ini akhirnya mempengaruhi dan membuat mandek—ini kalau kita tak hendak menyebut 'gagal'—terhadap keseluruhan proses penegakan hukum kita.

Dalam konteks ini, paling tidak ada empat fakta yang menandai kondisi mandek alias gagalnya proses penegakan hukum di Indonesia. Pertama, ketidakmandirian hukum; kedua, integritas penegak hukum yang buruk; ketiga, kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami pseudoreformatie syndrome; dan keempat, pertumbuhan hukum yang memang mandek (Amir

Syamsudin, 2008: x). Konkritnya, kegagalan proses penegakan hukum di Indonesia selama ini bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan dan enggan memahami kearifan lokal, aparat penegak hukum yang korup, budaya masyarakat yang buruk, dan lemahnya kelembagaan hukum.

Menurut Syamsuddin, semua realitas seperti disebut di atas tercermin sepenuhnya dari wajah hukum kita yang lebih banyak bersifat represitoris—tidak antisipatoris—sehingga terkadang peraturan perundang-undangan yang dibuat sering tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat secara utuh. Hal ini menciptakan masyarakat yang hyper regulated. Banyak peraturan dibuat, tetapi tidak ada yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Masyarakat hukum kita saat ini juga sedang rapuh: hanya melihat segala sesuatu dari kondisi yang saling bertentangan—benar salah, hitam putih, kalah menang, halal-haram. Alhasil, di sana sini setiap orang bisa saja saling cela sehingga memunculkan konflik dan pertikaian. Saling bakar dan saling bunuh akhirnya menjadi realitas yang gampang tersulut dengan ketidakpedulian pada norma-norma dan hukum yang berlaku. Sikap-sikap seperti ini bahkan kerap muncul di kalangan agamawan. Penganut agama yang satu merasa dirinya paling benar sehingga

tidak dapat menerima perbedaan (diversifikasi) apapun. Keadaan begini tentu saja melahirkan kondisi negara yang tanpa hukum (state of normlessness) dan menciptakan masyarakat yang membabi buta (blind society).

Selain itu, hukum kita selama ini tidak pula berfungsi sebagai law is for justice tetapi lebih berupa rumusan belaka sehingga tidak memiliki nilai intrinsiknya. Penyebab kondisi ini tentu saja karena sekian lama hukum yang kita gunakan cuma berpedoman pada justice is law atau law it for law. Akibat dari disfungsi ini, keadilan masyarakat yang harusnya menjadi cita-cita hukum akhirnya menjadi terabaikan.

Alhasil, hukum dan keadilan tak akan pernah bersatu selama kita masih menyaksikan fungsi institusi dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan belum tampil maksimal dan penuh integritas menjalankan fungsi dan perannya. Integritas, atau dalam bahasa Inggris disebut integrity, yang kita maksudkan sejak awal tulisan ini adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai, kebijakan organisasi, serta kode etik profesi meski dalam keadaan yang sulit untuk melakukan itu. Dengan kata lain integritas adalah prinsip, konsistensi, tidak neko-neko, satunya kata dan perbuatan. Termasuk integritas adalah mengkomunikasikan maksud, ide, dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung, sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.

Kembali kepada prinsip 90/10 Stephen Covey di atas, kondisi Kepolisian Republik Indonesia saat ini tentu akan tampak sebagai situasi yang 10 persen bila dipandang dari kacamata taruna dan calon perwira kepolisian. Mereka tidak memiliki otoritas untuk dapat memberikan arah dan kebijakan organisasional terhadap stereotipe dan berbagai pandangan miring publik atas citra kepolisian pasca pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan maupun perseteruan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tag line "Cicak dan Buaya". Dengan kata lain, saat ini kita berada pada situasi yang tak kita kehendaki. Namun demikian,

para taruna dan calon perwira memiliki reaksi untuk dapat memberikan 90 persen kontribusi terhadap situasi organisasi Kepolisian Republik Indonesia saat ini maupun mendatang.

Memang, kepolisian saat ini dibebani persoalan integritas akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik ini bahkan ditengarai telah melembaga di tubuh Polri. Indeks suap 15 institusi publik di Indonesia sebagaimana pernah dilansir Transparansi Internasional Indonesia menempatkan Polri diperingkat paling atas. Hasil survei itu menyatakan jumlah kasus suap tertinggi masih terjadi di lingkungan kepolisian yang notabene merupakan aparat penegak hukum terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Survei itu mengatakan bahwa 48 persen atau hampir separuh dari masyarakat yang melakukan interaksi dengan aparat/ institusi kepolisian harus membayar dan mengeluarkan uang agar masalah yang dihadapinya dapat selesai baik dan cepat.

Begitu pun, krisis integritas sebenarnya bukan hanya terjadi di lembaga kepolisian di Indonesia. Jika melirik ke negara lain, hal yang sama juga muncul. Bahkan

di Meksiko pernah terjadi dua kelompok polisi saling serang di jalanan menggunakan senjata api hingga menewaskan dan melukai sejumlah orang. Ironisnya, perang itu terjadi karena satu kelompok polisi ingin membebaskan pengedar narkoba yang ditangkap oleh kelompok polisi lain. Persoalan suap juga menjadi penyakit kronis di kepolisian Meksiko. Hampir setiap hari anggota kepolisian keluar mencari uang di jalan dan menyuap komandan mereka agar jabatan dan posisinya dipertahankan.

Kondisi kehilangan integritas itu berlangsung menahun, hingga akhirnya Presiden Meksiko Filipe Calderon yang memiliki kemauan politik membersihkan kepolisian dari praktik mafia menugasi seorang bernama Garcia Luna mereformasi kepolisian. Di tengah keraguan banyak pihak mengenai kemampuan Garcia yang tidak memiliki background kepolisian—karena ia berlatar belakang sarjana teknik—284 pejabat tinggi kepolisian yang terindikasi korup dan tidak ideal diberhentikan. Pada saat bersamaan, 1.600 perwira ia promosikan dan 3.000 orang ia rekrut guna menjadi personel kepolisian baru. Perekrutan anggota polisi baru itu tak dilakukan

sembarangan. Guna menearing kader terbaik, Garcia turun ke perguruan tinggi-perguruan tinggi. Ia merekrut sarjana-sarjana lulusan terbaik untuk bertugas di lembaga kepolisian. Bahkan, untuk menarik minat pemuda-pemuda yang cerdas dan memiliki integritas, Garcia menaikkan standar gaji di kepolisian hingga dua kali lipat.

Bersamaan dengan itu, Garcia mengembalikan anggota kepolisian yang masih bertugas ke bangku pendidikan. Mereka yang mengikuti pendidikan ini diharuskan melewati uji verifikasi dan standar profesi yang ketat jika ingin kembali bertugas di kepolisian. Garcia bersikukuh melakukan pekerjaan revolusioner ini karena ia berkeyakinan bahwa korupsi di lembaga penegak hukum akan mendorong evolusi kejahatan dan berbagai tindakan kriminal lainnya.

Rumus lain yang Garcia kembangkan adalah mengubah paradigma militeristik dan kekuatan senjata kepada kekuatan teknologi. "Pistol bagi aparat kepolisian adalah komputer", begitu slogan yang sering ia dengarkan. Maka, deretan polisi berseragam lengkap yang tekun duduk di depan komputer menjadi pemandangan biasa di gedung kepolisian saat itu.





Komputer-komputer ini terhubung dengan pusat data nasional. Sementara itu, di tengah ruangan terpasang

layar lebar yang menerima gambar dari kamera-kamera di berbagai penjuru kota. Jaringan data ini dengan cepat memberikan data para tersangka pelaku kejahatan dari berbagai kota di Meksiko.

Gebrakan ala Garcia akhirnya mengubah wajah kepolisian Meksiko yang sebelumnya coreng-mreng menjadi lembaga yang disebut-sebut sebagai kepolisian abad ke-21.

Tak cuma itu. Untuk benar-benar mempertahankan integritas, perlakuan pada hal yang bersifat remeh temeh juga dilakukan di era

berikutnya. Ini, misalnya, dalam hal perlakuan terhadap dompet. Dompet? Ya, dompet! Kepolisian Kota Aguascalientes, Meksiko, menggunakan dompet untuk mengembangkan budaya malu guna menjaga integritas, terutama bila terkait dengan upaya mencegah aparatnya melakukan pungli dan korupsi. Mereka sadar bahwa masih ada aparat kepolisian Aguascalientes yang menawarkan damai sebagai pengganti hilang atau jual beli tuntutan. Maka, untuk mengurangi tindak korupsi itu, mereka meminta para personel menyimpan foto anak dan istri mereka di dalam dompet. Kapan pun si polisi ingin berbuat curang, dia akan melihat wajah istri dan anak mereka saat membuka dompet. Dengan begitu mereka menjadi malu dan mengurungkan niatnya berbuat curang, melakukan pungli atau berlaku korup.

Tentu, bagi kita, idealnya tak perlu Presiden mesti turun tangan untuk menjaga integritas institusi kita. Semuanya terpulang kepada pribadi setiap kita, akankah kita menjaga integritas profesi yang dengan itu kita memperoleh dignity (kehormatan) ataukah memang telah siap badan dan bermuka

tembok bila orang-orang akan terus mencibir dan memicingkan mata? Setiap akibat, pasti karena sebab. Bagaimana pun, fungsi kepolisian melekat pada pribadi setiap orang yang telah memilih profesi ini sebagai jalan hidupnya. Berpakaian dinas atau tidak, orang-orang tetap melihat kita sebagai polisi.

Demikianlah. Tulisan ini bermaksud memotivasi setiap kita untuk peduli pada integritas karena di sanalah harga diri institusi dan kehormatan pribadi kita berada. Sebagai taruna kepolisian dan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab membina lahirnya polisi baru, Akademi Kepolisian (Akp) dan para taruna memiliki 90 persen reaksi yang dapat disumbangkan terhadap 10 persen situasi yang berada di luar kontrol kita. Cara kita bereaksi menentukan integritas kita sebagai polisi, sekaligus integritas dan komitmen kita terhadap penegakan hukum di Indonesia.



TENTANG IRJEN POL (PURN) DRS. ADITYAWARMAN, S.H., M.H

ADITYAWARMAN lulus dari pendidikan Akabri dengan peringkat tujuh terbaik pada Angkatan 1974. Ia bercita-cita menjadi polisi yang baik, benar, dan profesional. Tiga hal inilah yang diyakininya dapat membuat polisi di Indonesia memiliki marwah sehingga bakal memperoleh trust (kepercayaan) dari masyarakat.

Saat di Akabri, Adityawarman dipercaya menjabat Komandan Resimen Korps Taruna. Kariernya di kepolisian berawal saat diangkat sebagai Perwira Samapta di Komando Resor 206 Asahan pada tahun 1975. Setahun kemudian menjadi Kepala Seksi Lalu Lintas. Tiga tahun setelah itu menjadi Komandan Sektor 206-13. Kedua penugasan terakhir ini dalam wilayah hukum Komando Resor 206 Asahan Polda Sumatera Utara (Sumut).

Usai menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1982, Adityawarman kemudian bertugas di Polda Sulawesi Utara dan Tengah. Di sini ia menjabat Kepala Bagian Operasi Komando Resor 1513 (1982-1983), Wakil Kepala Satuan Serse (1983-1984), Wakil Kepala Kepolisian Resor Minahasa (1984-1986), Kepala Bagian Identifikasi Direktorat (Dit) Reserse (1986-1988), dan Kepala Bagian Sabhara Dit Samapta (1988).

Adityawarman mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada tahun 1988. Setelah itu ia menjabat Kepala Koordinator Siswa Pusat Pendidikan Serse Dit Pendidikan Mabes Polri (1989), Kabag Randal Dik Fik Polri Mabes Polri (1990-1991), Kabag Lakjarlat Ops Jarlat PTIK, dan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua Dit Pendidikan dan Pelatihan Polda Sulawesi Selatan Tenggara (1991-1995). Setelah itu: Kabag Ren Sesdit Serse Polri Mabes Polri (1005-1997), Dosen Sesko ABRI (1997-1999), Kapolwil Surabaya Polda Jawa Timur (1999-2000), Wadir Pidter Korserse Polri Mabes Polri (2000-2001), Karo Bin Polsus dan PPNS Sdeops Polri (2002-2004), Kapolda Maluku (2004-2006), Widya Iswara

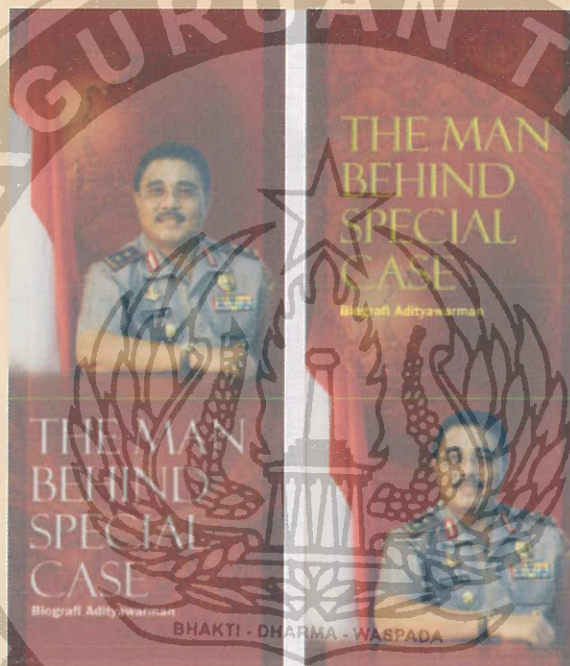
Sespim Pol (2006-2007), Staf Ahli Kapolri (2007-2009), dan Kapolda Aceh (2009-2010).

Sejumlah pendidikan dan pengayaan bidang kepolisian kerap pula ia jalani. Pada tahun 1990 Adityawarman mengikuti Dik Tutor Manajemen di Jakarta, IPRCFL UTS di Sydney, Australia (1996), Sesko ABRI di Bandung (1997), lalu Lemhannas di Jakarta (2001). Dalam hal penugasan luar negeri, Adityawarman menjadi duta Polri untuk Seminar Selatan di Port Moresby (Papua Nugini, 1993), Intellectual Property Right Covise dan Seminar Hak Atas Kekayaan Intelektual di Australia (1996). Ia pun melakukan comparative study di Malaysia (1997) dan Pakistan (2001). Pertemuan Interpol dilakukannya di Lyon, Prancis, pada tahun 2000.

Atas pengabdianya di kepolisian, Adityawarman dianugerahi sejumlah tanda jasa. Di antaranya: Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Dwidja Sistha Kesetiaan 16 tahun, Kesetiaan 24 tahun, Bhayangkara Nararya, dan Bhayangkara Pratama.

Aspek akademik di luar kepolisian pun dijalani laki-laki ini. Gelar Sarjana Hukum ia peroleh dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Magister Hukum dari Universitas Jayabaya Jakarta, dan strata doktoral ditempuhnya pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.

Pensiun dari Kepolisian RI pada tahun 2010, kini Adityawarman aktif pada sejumlah kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ia kerap menjadi pembicara dan menyumbangkan gagasan-gagasannya pada berbagai tema diskusi. Senarai kisah hidupnya, terutama dari aspek penyelesaian konflik di sejumlah daerah rawan di Indonesia, oleh penerbit Acehpoint telah diterbitkan dalam bentuk buku bergenre biografi berjudul Adityawarman: The Man Behind Special Case. Buku tersebut dapat dijumpai pada seluruh jaringan toko buku Gramedia.



LAPORAN UTAMA >>



**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AKADEMI KEPOLISIAN
JL. SULTAN AGUNG - CANDI BARU
SEMARANG**